



Geomedia

Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian

Geomedia Vol. 17 No. 2 Tahun 2019 | 126 - 133

<https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/index>

Hubungan Karakteristik Sosial Demografi dengan Pemberdayaan Wanita Usia Subur (WUS) Berstatus Kawin di DIY

Nurul Khotimah¹, Hastuti²

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

¹ nurulkhotimah@uny.ac.id*

² hastuti@uny.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
<p><i>Sejarah artikel</i></p> <p>Diterima : Revisi : Dipublikasikan :</p> <p>Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan Sosial demografi Wanita Usia Subur (WUS)</p>	<p>Pemberdayaan perempuan merupakan komponen kunci dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada wanita usia subur (WUS) berstatus kawin di DIY dengan tujuan: (1) mengetahui karakteristik sosial demografi, (2) mengetahui kecenderungan pemberdayaan, dan (3) menganalisis hubungan karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan WUS. Sumber data penelitian adalah SDKI tahun 2017. Hasil penelitian: (1) karakteristik sosial demografi WUS berstatus kawin di DIY kebanyakan berumur >35 tahun dan berpendidikan tamat SLTA atau lebih. (2) kecenderungan pemberdayaan WUS adalah sebagian sebesar sedang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei, tipe pendapatan dibayar, bentuk pembayaran sebagian besar berupa uang dan hanya sedikit dengan uang dan barang, kontrol atas pendapatan sebagian besar dari istri, dan partisipasi dalam berbagai pengambilan keputusan relatif tinggi antara lain untuk perawatan kesehatan wanita, kunjungan ke keluarga atau kerabat, pengeluaran besar rumah tangga, maupun ketiga keputusan tersebut. (3) hubungan karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan WUS menunjukkan ada hubungan antara umur dengan pekerjaan serta umur dengan kontrol atas pendapatan, namun tidak ada hubungan antara umur dengan pendapatan dan antara umur dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan, selain itu diketahui ada hubungan antara pendidikan dengan kontrol atas pendapatan serta antara pendidikan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan.</p>
<p>Keywords: Empowerment Women Socio-demographic Women of Child-Bearing Age</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Women's empowerment is a key component in poverty alleviation, economic growth, and sustainable development. The objectives of this study are: (1) to find out the socio-demographic characteristics of women of child-bearing age which have married in DIY, (2) to know the tendency of women of child-bearing age empowering which have married in DIY, and (3) to analyze the relationship between socio-demographic characteristics and empowerment of women of child-bearing age which have married in DIY. Sources of research data is SDKI 2017. The results showed that: (1) the socio-demographic characteristics of women child-bearing age which have married in DIY, most are over 35 years old and have graduated from senior high school or more (2) the tendency for the empowerment of women of child-bearing age which have married in DIY are currently working in the last 12 months before the survey, the type of income is paid, with the form of payment for work done in the form money and some money and goods, control of income is mostly from wives, and participation in decision making is relatively high for women's health care, for visits to family or relatives, for large household expenses, and for all three decisions, (3) the relationship of socio-demographic characteristics to empowering of women of child-bearing age which have married in DIY, it is known that there is a relationship between age with work and there is a relationship between age and control of income, however there is no relationship between age and income and there is no relationship between age and participation in decision making, besides that there is a relationship between education and control of income and there is a relationship between education and participation in decision making.</p>

© 2019 (Nurul Khotimah dan Hastuti). All Right Reserved

Pendahuluan

Sasaran dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi sasaran Bappenas 2014-2019 terkait dengan perempuan meliputi: (1) pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk pengembangan anak usia dini; (2) peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi, dan pengetahuan politik dan hukum serta peran perempuan dalam politik dan jabatan publik dalam rangka pencapaian kesetaraan gender; (3) intensifikasi upaya peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap anti kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan perempuan dan anak; (4) peningkatan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penyempurnaan perangkat hukum bagi berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta penyediaan layanan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak; dan (5) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen internasional serta penyediaan data dan statistik gender dan anak (Bappenas, 2013).

Aspek sosial demografi berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Pentingnya aspek sosial demografi sehingga pemberdayaan perempuan menjadi fokus kajian yang harus dikedepankan untuk melindungi reproduksi perempuan. Karakteristik sosial demografi perempuan secara bijak akan menuntun perempuan dalam pemberdayaan perempuan melalui pekerjaan, pendapatan, kontrol pendapatan, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan yang mandiri secara ekonomi dilihat dari pekerjaan dan pendapatan diharapkan mampu secara mandiri melindungi reproduksi mereka.

Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, ada 5 (lima) tingkat pemerataan. Pertama, pemerataan tingkat kesejahteraan, jika perempuan mempunyai peluang untuk peningkatan kemampuan perekonomian, maka akan sejahtera. Kedua, pemerataan akses, dalam hal ini perempuan mampu meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan informasi, kesempatan bekerja, dan kesempatan pendidikan yang baik dan sama kedudukannya dengan laki-laki. Ketiga, pemerataan kesadaran, dengan adanya kesadaran diharapkan perempuan dapat memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhannya. Keempat, pemerataan partisipasi, perempuan dalam hal ini tidak dianggap lagi sebagai objek atau sasaran pembangunan, tetapi sudah dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Kelima, pemerataan penguasaan, penguasaan atau kontrol perempuan terhadap pengambilan keputusan akan memberikan dampak pada tingkat pemberdayaan lebih baik, meskipun hegemoni budaya sering menempatkan perempuan bukan sebagai pengambil keputusan (Saptandari, 1999).

Pemberdayaan perempuan merupakan akses penting untuk pengambilan keputusan yang dilakukan perempuan bersama suami/pasangan, terutama untuk kesehatan reproduksi (International Conference on Population and Development/ICPD: United Nations, 1995). Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan melalui penguasaan dalam pengambilan keputusan perihal keluarga berencana atau pemakaian kontrasepsi yang aman secara simultan akan menurunkan fertilitas, bahkan memberikan pengaruh baik untuk kesehatan anak, kesejahteraan keluarga, dan keadilan rumah tangga (Kabeer, 1999).

Sejak SDKI 2002-2003 sampai dengan SDKI 2012, Total Fertility Rate (TFR) atau angka fertilitas total tetap sebesar 2,6 anak per wanita. Pada SDKI 2017 TFR turun menjadi 2,4 anak per wanita, namun angka tersebut belum mencapai sasaran rencana strategis di angka 2,3 anak per wanita. TFR

di daerah perdesaan 2,6 anak per wanita, sedangkan TFR di daerah perkotaan 2,3 anak per wanita. Perbedaan TFR untuk daerah perdesaan dan perkotaan disebabkan perbedaan fertilitas pada kelompok umur di bawah 25 tahun (SDKI, 2017). Penurunan jumlah kelahiran di Indonesia dapat dikaitkan peningkatan pemakaian kontrasepsi, yang meningkat sebanyak 2% menjadi 64% di SDKI 2017.

Hasil penelitian Khotimah dan Hastuti (2017) tentang Hubungan Sosiokultural dengan Hak Reproduksi Perempuan di DIY menunjukkan bahwa responden yang sosiokulturalnya baik, maka hak reproduksi terpenuhi. Aspek sosiokultural (pengetahuan, sikap, nilai, kepercayaan) mampu mendukung pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan dalam beberapa hal, yaitu: (1) mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, (2) memilih tempat persalinan di rumah sakit, puskesmas, klinik atau tenaga medis yang diharapkan oleh Ibu, (3) menentukan kapan Ibu hamil dan memiliki anak, (4) mengambil keputusan pemilihan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak antar kelahiran anak, (5) menentukan jumlah anak yang dimiliki, (6) memiliki hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.

kebijakan saat ini terkait pemberdayaan perempuan menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dalam Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW63) di New York (2019) disampaikan bahwa Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan sinergi dalam pemberdayaan perempuan. Beberapa usaha sinergi dilakukan melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang dilakukan secara kolaboratif dengan partisipasi dari seluruh sektor pemerintah. Dukungan kampanye solidaritas untuk memajukan kesetaraan gender juga dari Presiden RI. Hal ini membuktikan pembangunan responsif gender tidak hanya melalui peraturan dan kebijakan, tetapi juga gerakan masif serta perubahan pola pikir masyarakat

(www.kemenpppa.go.id). Pendidikan merupakan aspek penting dalam merubah pola pikir perempuan sehingga mampu berperan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Melalui pendidikan, perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sehingga mampu berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan (ICPD: United Nations, 1995).

Paparan di atas mendorong peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang hubungan karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan WUS berstatus kawin di DIY, yaitu dengan melakukan analisis terhadap data SDKI 2017.

Metode

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif mengarah pada pengungkapan suatu keadaan sebagaimana adanya disertai bukti-bukti yang terkait dengan karakteristik sosial demografi dan pemberdayaan WUS berstatus kawin di DIY dengan diberikan analisis. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder yang digunakan, yaitu data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 berupa angka-angka, selanjutnya ditabulasikan dan dilihat hubungan antar variabel serta diberikan analisis secara deskriptif. Sebagai unit analisisnya adalah WUS berstatus kawin di DIY. Hasil kajian tentang hubungan karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan WUS berstatus kawin di DIY selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sekaligus informasi untuk pengembangan penelitian berikutnya.

Hasil dan pembahasan

Karakteristik Sosial Demografi WUS Berstatus Kawin di DIY

Umur WUS berstatus kawin di DIY kebanyakan berada pada usia 35 tahun ke atas, yaitu sebesar 62,0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa WUS berstatus kawin di DIY berada pada

fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan karena pada umur tersebut disarankan untuk tidak hamil kembali dengan pertimbangan medis. Kondisi WUS tersebut diikuti umur 20-34 tahun, yaitu sebesar 37,3% yang merupakan umur terbaik untuk mengandung dan melahirkan, dan sisanya sebesar 0,6% berada pada umur 15-19 tahun atau berada pada umur yang sebaiknya tidak hamil. Umur WUS berstatus kawin dapat menjadi faktor yang menentukan dalam reproduksi wanita di DIY, termasuk penguatan untuk pemberdayaannya dalam mendukung kehidupan rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan Hartanto (1994), dimana untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, maka umur WUS dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) fase, yaitu (1) fase menunda atau mencegah kehamilan, ditujukan untuk umur WUS kurang dari 20 tahun karena pada umur tersebut merupakan umur sebaiknya tidak hamil, (2) fase menjarangkan kehamilan, ditujukan untuk umur WUS 20-35 tahun karena pada umur tersebut merupakan umur yang terbaik untuk mengandung dan melahirkan, dan (3) fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan, ditujukan untuk umur WUS di atas 35 tahun karena pada umur tersebut merupakan umur yang tidak dianjurkan untuk hamil lagi dengan pertimbangan medis.

Pendidikan WUS berstatus kawin di DIY yang tamat SLTA atau lebih sebesar 61,6%, diikuti 22,5% tidak tamat SLTA, dan sisanya 15,7% tamat/tidak tamat SD atau tidak sekolah. Tingkat pendidikan WUS berstatus kawin yang sebagian besar termasuk tinggi dapat mempengaruhi penurunan reproduksi wanita di DIY. Kondisi ini sejalan dengan yang dikemukakan Bongaarts (1978), bahwa pendidikan secara tidak langsung berhubungan dengan fertilitas karena wanita berstatus kawin yang berpendidikan tinggi cenderung memakai kontrasepsi untuk menurunkan fertilitas. Penurunan reproduksi wanita selanjutnya akan menguatkan wanita dalam melakukan pemberdayaan untuk mendukung kehidupannya, mengingat

pendidikan diperlukan wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Kecenderungan Pemberdayaan WUS Berstatus Kawin di DIY

WUS berstatus kawin di DIY yang sekarang sedang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei sebesar 79,1% atau 423 orang (SDKI, 2017). Persentase WUS berstatus kawin di DIY yang sekarang sedang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei lebih dari separuh dimungkinkan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga, termasuk kontrol atas pendapatan, apakah pendapatan yang diperoleh istri akan digunakan dengan pertimbangan dari istri saja, pertimbangan istri dengan suami, pertimbangan terutama suami, maupun lainnya. Persentase wanita yang sekarang sedang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei juga akan mempengaruhi kontrol yang lebih dalam partisipasi untuk pengambilan keputusan rumah tangga, seperti keputusan terkait perawatan kesehatan wanita, pengeluaran besar rumah tangga, kesempatan untuk mengunjungi keluarga atau kerabat, ketiga keputusan tersebut maupun salah satu dari keputusan tersebut.

Tipe pendapatan WUS berstatus kawin di DIY lebih dari separuh atau tepatnya sebesar 69,0% dibayar, dan sisanya 31,0% tidak dibayar. Tipe pendapatan WUS berstatus kawin tidak dibayar karena dimungkinkan mereka melakukan pekerjaan dalam keluarga. Tipe pendapatan atau bentuk pembayaran atas kerja yang dilakukan WUS berstatus kawin berupa uang saja sebesar 64,5% dan sisanya 4,5% berupa uang dan barang dimungkinkan karena mereka tidak mempunyai alternatif lain. Wanita lebih memandang bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah dalam rangka memperoleh pendapatan tambahan, mengingat peran laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Kontrol atas pendapatan WUS berstatus kawin di DIY sebagian besar (71,7%) dari istri, diikuti kontrol istri bersama suami (25,4%), kontrol suami (1,7%), dan tidak terjawab (1,1%). Kontrol

atas pendapatan istri sebagian besar dari istri menunjukkan bahwa istri mempunyai kesempatan untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan pendapatan yang diperolehnya dari bekerja. Kontrol atas pendapatan istri dari istri sendiri menunjukkan adanya pemberdayaan wanita untuk pengaturan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Prijono dan Pranarka (1996), bahwa pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan wanita untuk pengaturan ekonomi keluarga dapat menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang wanita dalam peningkatan ekonomi keluarga serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri wanita agar lebih mampu mandiri dan berpartisipasi dalam berbagai pengambilan keputusan.

Partisipasi WUS berstatus kawin di DIY dalam berbagai pengambilan keputusan relatif tinggi. Partisipasi tertinggi adalah pengambilan keputusan untuk perawatan kesehatan wanita sebesar 93,6%, diikuti kunjungan ke keluarga atau kerabat sebesar 92,4%, pengeluaran besar rumah tangga sebesar 74,4%, dan ketiga keputusan tersebut sebesar 70,5%. Hanya 2,0% WUS berstatus kawin yang tidak berpartisipasi dalam satupun dari keputusan tersebut. Partisipasi wanita adalah keikutsertaan wanita dalam mendayagunakan asset yang dimiliki. Pendapatan yang diperoleh oleh wanita bekerja dan kontrol atas pendapatan secara tidak langsung memiliki peranan penting untuk partisipasi wanita dalam setiap pengambilan keputusan. Partisipasi wanita juga merupakan salah satu indikator pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita memerlukan kemampuan wanita untuk bisa ikut mengakses dan mengambil manfaat dari bentuk partisipasi yang dilakukannya. Partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan untuk perawatan kesehatan wanita menunjukkan peran wanita dalam fungsi reproduksi. Partisipasi wanita dalam

pengambilan keputusan untuk pengeluaran besar dalam rumah tangga menunjukkan peran wanita dalam fungsi ekonomi, sedangkan partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan untuk berkunjung ke keluarga atau kerabat menunjukkan peran wanita dalam fungsi sosialisasi.

Hubungan Karakteristik Sosial Demografi dengan Pemberdayaan WUS Berstatus Kawin di DIY

WUS berstatus kawin di DIY yang bekerja dalam 12 bulan terakhir sebesar 79,1%. Jika dilihat menurut umur, persentase wanita berstatus kawin yang bekerja mulai umur 35-39 tahun mengalami peningkatan seiring peningkatan umur, dari 76,0% pada wanita berstatus kawin umur 35-39 tahun menjadi 84,7% pada wanita berstatus kawin umur 45-49 tahun. Hal ini dimungkinkan karena pada usia 35 tahun ke atas WUS berstatus kawin di DIY berada pada fase mengakhiri kehamilan dengan pertimbangan medis, sehingga mereka cenderung produktif dengan bekerja. Dapat disimpulkan **ada hubungan antara umur dengan pekerjaan**. Semakin meningkatnya umur WUS berstatus kawin di DIY, maka kecenderungan wanita untuk bekerja atau melakukan pemberdayaan juga semakin meningkat. Hal ini dimungkinkan terkait dengan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat pula.

Persentase WUS berstatus kawin di DIY yang mendapat bayaran uang saja maupun uang dan barang sebesar 69,0%, sedangkan sisanya bekerja tetapi tidak dibayar sebesar 31,0%. Jika dilihat menurut umur, tipe pendapatan berupa uang saja persentase tertinggi berada pada umur 30-34 tahun sebesar 85,9%, sedangkan tipe pendapatan berupa uang dan barang persentase tertinggi berada pada umur 45-49 tahun sebesar 6,0%. Hal ini dimungkinkan karena WUS berstatus kawin dengan usia muda lebih mudah memilih pekerjaan dengan tipe pendapatan berupa uang, sedangkan untuk usia lebih tua mereka cenderung tidak pilih-pilih pekerjaan sehingga tidak mempermasalahkan jika tipe pendapatan berupa

uang dan barang. Persentase WUS berstatus kawin yang bekerja tetapi tidak dibayar paling tinggi berada pada umur 35-39 tahun (41,6%). Hal ini kemungkinan karena pada usia tersebut mereka sudah mulai kesulitan untuk melakukan pilihan pekerjaan di luar keluarga, sehingga alternatifnya bekerja di keluarga tetapi tidak dibayar. Dapat disimpulkan **tidak ada hubungan antara umur dengan pendapatan**. Semakin meningkatnya umur WUS berstatus kawin di DIY, maka kecenderungan wanita untuk bekerja atau melakukan pemberdayaan tidak menuntut tipe pendapatan tertentu, bahkan mereka rela untuk tidak dibayar.

Orang yang memutuskan penggunaan pendapatan istri atau WUS berstatus kawin di DIY kebanyakan adalah istri (71,7%), dan sisanya 25,4% diputuskan istri bersama suami, 1,7% diputuskan terutama suami, dan 1,1% tidak terjawab. Jika dilihat menurut umur, orang yang memutuskan penggunaan pendapatan istri terutama istri sendiri mengalami peningkatan seiring peningkatan umur, dari 68,9% pada wanita berstatus kawin umur 40-44 tahun menjadi 72,6% pada wanita berstatus kawin umur 45-49 tahun. Hal berbeda yang dijumpai adalah orang yang memutuskan penggunaan pendapatan istri yaitu istri dan suami serta terutama suami pada WUS berstatus kawin di DIY lebih banyak dijumpai pada umur 40-44 tahun dibandingkan umur 45-49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa WUS berstatus kawin di DIY dengan usia lebih tua (45-49 tahun), maka semakin mandiri dalam melakukan kontrol atas pendapatan yang diperoleh karena banyaknya pengalaman yang telah dipelajari dan semakin meningkatnya penalaran untuk berpikir kreatif dalam rangka penguatan ekonomi keluarga. Dapat disimpulkan **ada hubungan antara umur dengan kontrol atas pendapatan**. Semakin meningkatnya umur WUS berstatus kawin di DIY, maka kecenderungan wanita untuk melakukan pemberdayaan dalam kontrol pendapatan juga semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pada usia lebih tua, wanita dimungkinkan memiliki kemandirian untuk

melakukan kontrol atas pendapatan seiring puncak prestasi yang diperolehnya.

Partisipasi WUS berstatus kawin dalam pengambilan keputusan paling besar adalah dalam hal perawatan kesehatan wanita (93,6%), diikuti partisipasi dalam berkunjung ke keluarga atau kerabat (92,4%), partisipasi dalam pengeluaran besar dalam rumah tangga (74,4%), partisipasi ketiga keputusan tersebut (70,5%), dan hanya 2,0% WUS yang tidak berpartisipasi satupun dari keputusan tersebut. Jika dilihat menurut umur, partisipasi WUS dalam hal perawatan kesehatan wanita mengalami peningkatan pada umur 35-39 tahun sebesar 96,5%, kemudian mengalami penurunan kembali seiring peningkatan umur WUS. Peningkatan partisipasi WUS pada umur 40-44 tahun yaitu untuk partisipasi dalam hal pengeluaran besar dalam rumah tangga (81,4%), partisipasi dalam berkunjung ke keluarga atau kerabat (95,0%), dan partisipasi ketiga keputusan tersebut (76,3%), namun kembali mengalami penurunan pada WUS umur 45-49 tahun. Fluktuatifnya partisipasi menurut umur WUS di DIY dalam pengambilan keputusan dimungkinkan karena berbagai faktor, seperti pekerjaan dan kontrol atas pendapatan. Wanita yang bekerja atau melakukan pemberdayaan, memperoleh pendapatan, dan memiliki kontrol atas pendapatan yang diperoleh dimungkinkan memiliki partisipasi tinggi dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan wanita, pengeluaran besar dalam rumah tangga, berkunjung ke keluarga atau kerabat, dan ketiga keputusan tersebut. Sebaliknya wanita yang tidak bekerja dimungkinkan memiliki partisipasi rendah dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan wanita, pengeluaran besar dalam rumah tangga, berkunjung ke keluarga atau kerabat, dan ketiga keputusan tersebut, bahkan dimungkinkan juga tidak berpartisipasi satupun dari keputusan tersebut. Fluktuatifnya partisipasi juga dimungkinkan terkait dengan kebutuhan ekonomi keluarga yang bervariasi. Dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan antara**

umur dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan wanita, pengeluaran besar dalam rumah tangga, berkunjung ke keluarga atau kerabat, dan ketiga keputusan tersebut dimungkinkan lebih dipengaruhi oleh pekerjaan dan kontrol atas pendapatan.

Orang yang memutuskan penggunaan pendapatan istri adalah terutama istri (71,7%), istri bersama suami (25,4%), terutama suami (1,7%), dan tidak terjawab (1,1%). Jika dilihat menurut pendidikan, orang yang memutuskan penggunaan pendapatan istri terutama istri sendiri mengalami peningkatan seiring peningkatan pendidikan, dari 70,9% pada wanita berstatus kawin pendidikan tamat SLTA menjadi 75,6% pada wanita berstatus kawin pendidikan perguruan tinggi. Orang yang memutuskan penggunaan pendapatan istri yaitu istri bersama suami lebih banyak dijumpai pada pendidikan tamat SLTA (29,1%) dibandingkan pendidikan perguruan tinggi (17,5%). Hal ini menunjukkan bahwa WUS berstatus kawin di DIY dengan pendidikan perguruan tinggi, semakin mandiri dalam melakukan kontrol atas pendapatan yang diperolehnya. Dapat disimpulkan **ada hubungan antara pendidikan dengan kontrol atas pendapatan.** Semakin meningkat pendidikan WUS berstatus kawin di DIY, maka kontrol atas pendapatan yang diperolehnya juga semakin meningkat.

Partisipasi WUS berstatus kawin di DIY dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan wanita (93,6%), partisipasi dalam pengeluaran besar dalam rumah tangga (74,4%), partisipasi dalam berkunjung ke keluarga atau kerabat (92,4%), partisipasi ketiga keputusan tersebut (70,5%), dan sisanya 2,0% tidak berpartisipasi satupun dari keputusan tersebut. Jika dilihat menurut pendidikan, partisipasi WUS dalam hal perawatan kesehatan wanita, pengeluaran besar dalam rumah tangga, berkunjung ke keluarga atau kerabat, dan ketiga keputusan tersebut meningkat persentasenya seiring meningkatnya pendidikan

yang dimiliki wanita. Dapat disimpulkan bahwa **ada hubungan antara pendidikan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan.** Hal ini dimungkinkan karena pendidikan adalah salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraannya, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan. Seiring peningkatan derajat kesejahteraan maka dimungkinkan partisipasi wanita dalam hal perawatan kesehatan wanita, pengeluaran besar dalam rumah tangga, berkunjung ke keluarga atau kerabat, dan ketiga keputusan tersebut juga akan meningkat.

Simpulan

Karakteristik sosial demografi WUS berstatus kawin kebanyakan dengan umur 35 tahun ke atas (62,0%), dimungkinkan cenderung menghentikan/mengakhiri kehamilan karena pada umur tersebut tidak disarankan kembali hamil kembali atas pertimbangan medis. Pendidikan WUS paling banyak adalah tamat SMA (61,6%), yang dimungkinkan dapat mempengaruhi reproduksi wanita di DIY dan menguatkan wanita dalam melakukan pemberdayaan untuk mendukung kehidupan ekonomi keluarga.

Kecenderungan pemberdayaan WUS berstatus kawin di DIY adalah bekerja dalam 12 bulan terakhir sebelum survei (79,1%) dan memiliki pendapatan sehingga dimungkinkan memiliki kontrol lebih atas pendapatan yang diperoleh dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tipe pendapatan WUS didominasi dengan dibayar (69,0%) dan sisanya tidak dibayar (31,0%). Tipe pendapatan atas pekerjaan yang dilakukan didominasi berupa uang (64,5%) dan berupa uang dan barang (4,5%). Kontrol atas pendapatan WUS sebagian besar (71,7%) dari istri, diikuti kontrol istri bersama suami (25,4%), kontrol suami (1,7%), dan tidak terjawab (1,1%). Kontrol atas pendapatan istri terutama dari istri menunjukkan adanya pemberdayaan wanita untuk pengaturan ekonomi keluarga. Partisipasi WUS dalam berbagai pengambilan keputusan relatif

tinggi. Partisipasi tertinggi adalah pengambilan keputusan untuk perawatan kesehatan wanita (93,6%), diikuti kunjungan ke keluarga atau kerabat (92,4%), pengeluaran besar rumah tangga (74,4%), dan ketiga keputusan tersebut (70,5%). Hanya sedikit WUS berstatus kawin yang tidak berpartisipasi dalam satupun dari keputusan tersebut (2,0%).

Terdapat beberapa hubungan antara karakteristik sosial demografi dengan pemberdayaan WUS berstatus kawin, yaitu hubungan antara umur dan pekerjaan, hubungan antara umur dan kontrol atas pekerjaan, hubungan antara pendidikan dan kontrol atas pendapatan, serta hubungan antara pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Karakteristik sosial demografi dan pemberdayaan WUS berstatus kawin yang tidak saling berhubungan, yaitu antara umur dan pendapatan dan antara umur dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Puslitbang KB dan KS BKKBN, yang telah membiayai penelitian ini melalui pekerjaan "Program dan Kerjasama Penelitian dengan Mitra dan Jejaring Litbang Kependudukan".

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2013). *Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-*

2019). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). ISBN 978-602-19591-1-4.

- Bongaarts, J.. (1978). *A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility*.
- Hartanto, H. (1994). *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kabeer, N. (1999). The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change* Vol. 30 (1999), 435-464.
- Khotimah, N. dan Hastuti. (2017). Hubungan Sosiokultural dengan Hak Reproduksi Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: LPPM UNY bekerjasama dengan BKKBN.
- Prijono, Onny S., & Pranarka, A.M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Saptandari, P. (1999). Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 2, April 1999, hh 33-38.
- United Nations. (1995). *Report of International Conference on Population and Development*. United Nations, Sales No. 95.XIII.18, A/CONF.171/13/Rev.1, ISBN 92-1-151289-1. www.kemennppa.go.id. *CSW63: Indonesia Tekankan Pentingnya Sinergisitas dalam Pemberdayaan Perempuan*. Sabtu, 16 Maret 2019.